



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2023

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Ridho dan hidayah-Nya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Rencana Kerja pada tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, Dana Indikatif berserta sumbernya serta Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencanan Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan.

Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur ini dapat mencerminkan kinerja kesinambungan Program & Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Larantuka, Agustus 2023


Sekretaris DPRD,
Ir. YOHANISKOPONG
PEMUDA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19660226 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 15

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 30

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 30

.....

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB V PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 7

Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur 16

Tabel II.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 19

Tabel III.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Inspektorat Daerah
Kabupaten Flores Timur 32

Tabel IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Flores Timur 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antara Renja PD Tahun 2023 dengan Dokumen
Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran 2



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang mendasari perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
FLORES TIMUR TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan perubahan dokumen perencanaan Daerah yang menguraikan perubahan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
 - b. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah; dan
 - c. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Bab VI : Penutup
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijadikan sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyempurnaan Perubahan Renja PD Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) PD wajib melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan melakukan Perubahan Renja PD Tahun 2023.
- (2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2023 maka yang digunakan adalah hasil Perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara Perubahan Renja PD Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

- (2) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan evaluasi Perubahan Renja PD Tahun 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Juli 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No-);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1),Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- h. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 72);
- i. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
- j. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.
- k. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Sedangkan tujuannya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Sekretariat DPRD Tahun 2023

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatif.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023

Dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II dan Capain Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1. berikut:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan							TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023 s/d 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi		Ket.
											I		II				
NOMENKLATUR KEPMEN 050 - 3708 TAHUN 2020							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)											
3					4		6		8		9		10		13 = 9+10+11+12		17
x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	5	36.000.000	5	12.000.250	-	1	3.537.000	1	3.537.000		
	xx	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000	1	12.000.135		1	3.593.000	1	3.593.000		
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan (dokumen)	433	2.032.000.000	23	2.160.806.870	5	361.889.209	4	470.187.378	9	832.076.587	
x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	420	1.952.000.000	14	2.109.806.870	3	347.939.209	4	470.187.378	7	818.126.587	
x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Jasa Administrasi Keuangan (dokumen)	9	60.000.000	9	51.000.000	2	13.950.000	-	-	2	13.950.000	
x	xx	01	2,02	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,02	07	Koordinasi & penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan /semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (dokumen)	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4	5.500.000	1	10.000.413	-	-	17	5.809.000		5.809.000	
x	xx	01	2,03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	2.500.000	1	10.000.413		1	5.809.000	1	5.809.000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan						TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023 s/d 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi		Ket.
										I		II				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	K	RP	K	RP	K	
3					4		6		8		9		10		13 = 9+10+11+12	17
x	xx	01	2,06	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	1.500.000	-	-			16		16	-
x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen adminstrasi kepegawaian (Dokumen)	2	3.750.000	1	9.997.354	-	-	1	7.534.100		7.534.100
x	xx	01	2,05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2,05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1	1.250.000	1	9.997.354			1	7.534.100	1	7.534.100
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum (%)	51	580.600.000	70.123	323.983.446	15	42.715.860	16	47.652.000	31	90.367.860
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	20.000.000	20	9.994.154	5	2.491.500	1	15.000	6	2.506.500
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan (paket)	1	170.000.000	1	20.152.094	1	490.000	1	10.170.000	2	10.660.000
		01	2,06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	1	80.000.000	7	84.934.148	1	8.582.000	1	2.078.000	2	10.660.000
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	2	88.000.000	21	60.003.000	1	910.000	4	11.040.000	5	11.950.000
x	xx	01	2,06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan (dokumen)	2	45.000.000	70.000	37.000.050	1	900.000	-	-	1	900.000
x	xx	01	2,06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)	3	25.000.000	3	2.250.000			3	2.250.000	3	2.250.000
x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	60.100.000	1	35.000.000	1	117.000	1	404.000	2	521.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan							TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023 s/d 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi		Ket.
											I		II				
KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
3					4		6		8		9		10		13 = 9+10+11+12		17
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20	90.000.000	70	74.650.000	5	29.225.360	5	21.695.000	10	50.920.360	
x	xx	01	2,06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	2	2.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,07	01	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Laporan)	46	464.000.000	46	205.100.000	11	41.783.894	14	45.314.396	25	87.098.290	
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)	4	3.000.000	4	1.500.000	-	-	1	200.000	1	200.000	
x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	65.000.000	12	50.000.000	3	4.983.894	5	8.314.396	8	13.298.290	
x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)	30	396.000.000	30	153.600.000	8	36.800.000	8	36.800.000	16	73.600.000	
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah SKPD (%)	45	289.982.024	15	158.335.000	2	2.369.630	2	22.913.500	4	25.283.130	
x	xx	01	2,09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	78.482.024	3	78.469.937	-	-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan							TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023 s/d 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN 2023 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi		Ket.	
											I		II					
NOMENKLATUR KEPMEN 050 - 3708 TAHUN 2020							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN												INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
3						4		6		8		9		10		13 = 9+10+11+12		17
x		xx	01	2,09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	17	95.000.000	5	49.946.123	1	2.369.630	-	473.500	1	2.843.130	
x		xx	01	2,09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	10	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x		xx	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	1	2.500.000	1	4.995.000	-	-	-	-	-	-	
x		xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	2	65.000.000	1	19.984.440	1	-	1	18.945.000	2	18.945.000	
x		xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	6	15.000.000	5	4.939.500	-	-	1	3.495.000	1	3.495.000	
x		xx	01	2,09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	6	26.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x		xx	02	2,2		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		570	11.710.000.000	42	12.297.273.780	3	1.781.642.432	4	4.066.243.425	7	5.847.885.857	
x		xx	02	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)	420	11.500.000.000	12	12.252.273.780	3	1.781.642.432	4	4.066.243.425	7	5.847.885.857	
x		xx	02	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)	120	165.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
x		xx	02	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (Orang)	30	45.000.000	30	45.000.000	-	-	-	-	-	-	
x		xx	02	2,16		Layanan Administrasi DPRD		36	921.531.301		667.642.125		247.960.749		237.229.749		485.190.498	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan								TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023 s/d 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi		Ket.
												I		II				
NOMENKLATUR KEPMEN 050 - 3708 TAHUN 2020						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
3					4			6		8		9		10		13 = 9+10+11+12	17	
x	xx	02	2.16	.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (laporan)	6	54.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
x	xx	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (laporan)	30	867.531.301	30	667.642.125	10	247.960.749	-	237.229.749	10	485.190.498		
4	02				SEKRETARIAT DPRD		83	5.715.269.150	84	3.025.035.155	-	-	26	1.863.084.000	26	1.863.084.000		
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)	83	5.715.269.150	84	3.025.035.155	-	-	26	1.863.084.000	26	1.863.084.000		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748.019.150	8	326.174.950	-	-	2	11.069.000		11.069.000		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)	5	79.019.150	3	45.995.440	-	-	1	3.229.000	1	3.229.000		
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Ranperda (dokumen)	5	560.000.000	5	280.179.510	-	-	1	7.840.000	1	7.840.000		
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan kajian perundang- undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)	3	59.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)	2	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265.000.000	9	129.814.268	-	-	-	-	-	-		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)	1	35.000.000	2	20.000.660	-	-	-	-	-	-		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan									TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023 s/d 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi		Ket.
													I		II				
NOMENKLATUR KEPMEN 050 - 3708 TAHUN 2020						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN															
3						4	6	8	9	10	13 = 9+10+11+12		17						
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)	2	75.000.000	2	30.017.500	-	-		-	-				
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)	2	75.000.000	1	30.000.140	-	-		-	-				
4	02	02	2.02	05	Pembahasan laporan semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)	2	30.000.000	1	20.001.128	-	-		-	-				
4	02	02	2.02	06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)	1	50.000.000	3	29.794.840	-	-		-	-				
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-				
4	02	02	2.03	06	Pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)	2	25.000.000	-	-	-	-		-	-				
4	02	02	2.03	07	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)	1	50.000.000	-	-	-	-		-	-				
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607.250.000	31	584.499.644	-	-	30	544.138.758	30	544.138.758			
4	02	02	2.04	02	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)	5	600.000.000	30	577.250.000	-	-	30	544.138.758	30	544.138.758			
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)	1	3.750.000	1	7.249.644	-	-		-	-				
4	02	02	2.04	07	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)	1	3.500.000	-	-	-	-		-	-				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan							TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023 s/d 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2023 yang Dievaluasi		Ket.
											I		II				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3.930.000.000	35	1.974.195.362	-	-	24	1.852.015.000	24	1.852.015.000	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)	30	280.000.000	30	150.000.020	-	-	20	109.430.000	20	109.430.000	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)	5	50.000.000	2	25.635.433	-	-	1	7.505.000	1	7.505.000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)	30	3.600.000.000	3	1.798.559.909	-	-	3	1.735.080.000	3	1.735.080.000	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		16	90.000.000	1	10.350.931	-	-	1	365.000	1	365.000	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10	50.000.000	-	-	-	-			-	-	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus	5	15.000.000	1	10.350.931	-	-	1	365.000	1	365.000	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	25.000.000	-	-	-	-			-	-	

2.2. Analisa Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan suatu alat ukur bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat ditunjuk pada Tabel II.2.

Tabel II.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	<input type="checkbox"/>	✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintergrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan.		✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka yang menjadi isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian.
2. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.
3. Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
4. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer, Kearsipan dan lain-lain).
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD.
7. Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyadari bahwa tanggungjawab keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD merupakan implementasi dari harapan dan keinginan masyarakat luas serta bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk dapat melakukan fasilitasi terhadap DPRD tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD antara lain :
 - Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.
 - Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.
 - Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.
 - Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD. RKPD Tahun 2023 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah telah terakomodir di dalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur terdapat 2 (dua) program yaitu 1 program urusan dan 1 program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Fasilitasi Tugas DPRD

Dengan tetap mengacu pada visi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dimana didalamnya terdapat 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan, Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur

Rancaangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023		
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DPRD			22,331,278,024					24,065,382,475	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			16,590,082,024		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			18,350,113,325	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	16,590,082,024		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	18,350,113,325	
	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100				<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100		
	<i>Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)</i>	100				<i>Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)</i>	100		
	<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>	100				<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>	100		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)</i>	9	42,750,000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)</i>	9	42,750,000	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	4,250,000	Larantuka (OPD)	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	4,250,000	Larantuka (OPD)

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	5	31,000,000	Larantuka (OPD)	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	5	31,000,000	Larantuka (OPD)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	2	5,000,000	Larantuka (OPD)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	2	5,000,000	Larantuka (OPD)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)</i>	13	2,032,000,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)</i>	13	2,032,000,000	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(org/bln)</i>	30/14	1,952,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Vv	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(org/bln)</i>	30/14	1,952,000,000	Larantuka (OPD)
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>	9	60,000,000	Larantuka (OPD)	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>	9	60,000,000	Larantuka (OPD)
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)</i>	1	3,500,000	Larantuka (OPD)	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)</i>	1	3,500,000	Larantuka (OPD)

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)</i>	2	15,000,000	Larantuka (OPD)	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)</i>	2	15,000,000	Larantuka (OPD)
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	4	5,500,000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	4	5,500,000	
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	2	53,750,000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	2	3,750,000	
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)

Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	1,250,000	Larantuka (OPD)	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	1,250,000	Larantuka (OPD)
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	2	50,000,000	Larantuka (OPD)					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</i>	50	585,100,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</i>	50	580,600,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	20	20,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	20	20,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan (paket)</i>	1	170,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan (paket)</i>	1	170,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)</i>	1	80,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)</i>	1	80,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)</i>	32,5	65,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)</i>	2	88,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan (paket)</i>	2	45,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan (paket)</i>	2	45,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)</i>	3	25,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)</i>	3	25,000,000	Larantuka (OPD)

Fasilitasi kunjungan tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	1	60,100,000	Larantuka (OPD)	Fasilitasi kunjungan tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	1	60,100,000	Larantuka (OPD)
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	20	120,000,000	Larantuka (OPD)	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	20	90,000,000	Larantuka (OPD)
					Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100	300,000,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100	2,300,000,000	
				Larantuka	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>	1	2,000,000,000	Larantuka
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	1	300,000,000	Larantuka (OPD)	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	1	300,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	46	464,000,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	46	464,000,000	
Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)</i>	4	3,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)</i>	4	3,000,000	Larantuka (OPD)

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	12	65,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	12	65,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)</i>	30	396,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)</i>	30	396,000,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)</i>	45	312,982,024		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)</i>	45	289,982,024	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)</i>	3	105,482,024	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)</i>	3	78,482,024	Larantuka (OPD)
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>	17	91,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>	17	95,000,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)</i>	30	7,500,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)</i>	30	7,500,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	2	65,000,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	2	65,000,000	Larantuka (OPD)

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	12	15,000,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	12	15,000,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	10	26,500,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	10	26,500,000	Larantuka (OPD)
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		393	11,710,000,000		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		393	11,710,000,000	
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)</i>	360	11,500,000,000	Larantuka (OPD)	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)</i>	360	11,500,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)</i>	3	165,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)</i>	3	165,000,000	Larantuka (OPD)
Pelaksanaan medical check up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (orang)</i>	30	45,000,000	Larantuka, luar daerah	Pelaksanaan medical check up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (orang)</i>	30	45,000,000	Larantuka, luar daerah
Layanan Administrasi DPRD		36	1,084,000,000		Layanan Administrasi DPRD		36	921,531,301	
Fasilitasi fraksi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (laporan)</i>	6	54,000,000	Larantuka (OPD)	Fasilitasi fraksi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (laporan)</i>	6	54,000,000	Larantuka (OPD)
Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (laporan)</i>	30	1,030,000,000	Larantuka (OPD)	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (laporan)</i>	30	867,531,301	Larantuka (OPD)
Sekretariat DPRD			5,741,196,000		Sekretariat DPRD			5,715,269,150	

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		114	5,741,196,000		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		114	5,715,269,150	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748,946,000		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748,019,150	
Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	79,946,000	Larantuka (OPD)	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	79,019,150	Larantuka (OPD)
Pembahasan rancangan perda	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	560,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan rancangan perda	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	560,000,000	Larantuka (OPD)
Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)</i>	3	59,000,000	Larantuka (OPD)	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)</i>	3	59,000,000	Larantuka (OPD)
Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)</i>	2	50,000,000	Larantuka (OPD)	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)</i>	2	50,000,000	Larantuka (OPD)
Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265,000,000		Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265,000,000	
Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)</i>	1	35,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)</i>	1	35,000,000	Larantuka (OPD)
Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)
Pembahasan APBD perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan APBD perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)

Pembahasan laporan semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)</i>	2	30,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan laporan semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)</i>	2	30,000,000	Larantuka (OPD)
Pembahasan pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka (OPD)
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	100,000,000		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	75,000,000	
Pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)</i>	2	25,000,000	Larantuka (OPD)	Pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)</i>	2	25,000,000	Larantuka (OPD)
Pengawasan penggunaan anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)</i>	1	75,000,000	Larantuka	Pengawasan penggunaan anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka
Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607,250,000		Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607,250,000	
Pendalaman tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)</i>	5	600,000,000	Luar daerah	Pendalaman tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)</i>	5	600,000,000	Luar daerah
Publikasi dan dokumentasi dewan	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)</i>	1	3,750,000	dalam daerah	Publikasi dan dokumentasi dewan	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)</i>	1	3,750,000	dalam daerah
Penyusunan program kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)</i>	1	3,500,000	dalam daerah	Penyusunan program kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPR(dokumen)</i>	1	3,500,000	dalam daerah

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3,930,000,000		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3,930,000,000	
Kunjungan kerja dalam daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)</i>	30	280,000,000	dalam daerah	Kunjungan kerja dalam daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)</i>	30	280,000,000	dalam daerah
Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)</i>	5	50,000,000	Larantuka	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)</i>	5	50,000,000	Larantuka
Pelaksanaan reses	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)</i>	30	3,600,000,000	dalam daerah	Pelaksanaan reses	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)</i>	30	3,600,000,000	dalam daerah
Fasilitasi Tugas DPRD		16	90,000,000		Fasilitasi Tugas DPRD		16	90,000,000	
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)</i>	10	50,000,000	dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)</i>	10	50,000,000	dalam daerah
Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)</i>	5	15,000,000	dalam daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)</i>	5	15,000,000	dalam daerah
Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)</i>	1	25,000,000	dalam daerah	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)</i>	1	25,000,000	dalam daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD. Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 16 Kegiatan. Dengan demikian Tahun 2023 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mengembangkan mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mekanisme check and balance dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai cerminan representatif lembaga perwakilan rakyat.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Atas dasar hal itu guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam menjalankan check and balance terhadap kebijakan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD merupakan fasilitator dalam upaya menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang maksimal sebagai pengemban amanah rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pelayanan Sekretariat DPRD yang bersinergi dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (T-1) dan sasaran ke-1, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (S-1) adalah melalui Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode Tahun 2023 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada DPRD ”*

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh

karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Rencana Kerja Tahun 2023 untuk pelaksanaan dukungan pelayanan kepada lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur tertuang dalam Rencana Kerja yaitu dengan melaksanakan 2 Program, 16 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yang termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Fasilitasi Tugas DPRD

TABEL III.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBE R DANA	P N	P D	TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		114	5,715,269,150				PP	114	4,641,196,000
4	02	02	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748,019,150				KP	15	752,000,000
4	02	02	2:01	03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (dokumen)	3	59,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	60,000,000
4	02	02	2:01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)	2	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	51,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265,000,000				KP	8	756,896,000
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)	1	35,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	79,946,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	560,000,000

4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	66,950,000
4	02	02	2.02	05	Pembahasan laporan semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)</i>	2	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	50,000,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	45,000,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	75,000,000				KP	3	100,000,000
4	02	02	2.03	06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)</i>	2	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	25,000,000
4	02	02	2.03	07	Pengawasan penggunaan anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	75,000,000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607,250,000				KP	7	407,300,000
4	02	02	2.04	02	Pendalaman tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)</i>	5	600,000,000	Luar daerah	APBD II (DAU)			5	400,000,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan dokumentasi dewan	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)</i>	1	3,750,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	3,800,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan program kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)</i>	1	3,500,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	3,500,000

4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3,930,000,000				KP	65	2,535,000,000
4	02	02	2.05	01	Kunjungan kerja dalam daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)</i>	30	280,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			30	280,000,000
4	02	02	2.05	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)</i>	5	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	55,000,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)</i>	30	3,600,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			30	2,200,000,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		16	90,000,000				KP	16	90,000,000
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)</i>	10	50,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			10	50,000,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)</i>	5	15,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			5	15,000,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)</i>	1	25,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	25,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 termuat pada Tabel IV.1 sebagai berikut :

4-2	0-0	0-0	01		SEKRETARIAT DPRD			24.065.382.475			20.323.340.369		(3.742.042.106)	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			18.350.113.325			16.389.139.131		(1.960.974.194)	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	18.350.113.325		100	16.389.139.131		(1.960.974.194)	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100				
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100			100				
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100				
x	xx	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	11	42.750.000		11	66.000.143		23.250.143	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4.250.000	Larantuka (OPD)	2	29.999.138	Dalam dan Luar Daerah	25.749.138	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	2.500.000	Larantuka (OPD)	2	12.000.620	Larantuka (OPD)	9.500.620	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	5	31.000.000	Larantuka (OPD)	5	12.000.250	Larantuka (OPD)	(18.999.750)	APBD II (DAU)

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			P N	P D					
					TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp,-)			LOKASI	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	(13)
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000	Larantuka (OPD)	2	12.000.135	Larantuka (OPD)	7.000.135	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	13	2.032.000.000		13	2.160.806.870		128.806.870			KP	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bln)	30/14	1.952.000.000	Larantuka (OPD)	30/14	2.109.806.870	Larantuka (OPD)	157.806.870	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	9	60.000.000	Larantuka (OPD)	9	51.000.000	Larantuka (OPD)	(9.000.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.02	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	1	3.500.000	Larantuka (OPD)		-		(3.500.000)				
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	2	15.000.000	Larantuka (OPD)		-		(15.000.000)				
x	xx	01	2.02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	1	1.500.000	Larantuka (OPD)		-		(1.500.000)				
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	5.500.000		2	10.000.413		4.500.413			KP	
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	1	1.500.000	Larantuka (OPD)		-		(1.500.000)				
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	2.500.000	Larantuka (OPD)	2	10.000.413	Larantuka (OPD)	7.500.413	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	1.500.000	Larantuka (OPD)		-		(1.500.000)				
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	3.750.000		1	9.997.354		6.247.354			KP	
x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1	2.500.000	Larantuka (OPD)		-		(2.500.000)				
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1	1.250.000	Larantuka (OPD)	1	9.997.354	Larantuka (OPD)	8.747.354	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	50	580.600.000		50	323.983.446		(256.616.554)			KP	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	20.000.000	Larantuka (OPD)	20	9.994.154	Larantuka (OPD)	(10.005.846)	APBD II (DAU)			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					P	N	D
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	(13)					
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	170.000.000	Larantuka (OPD)	1	20.152.094	Larantuka (OPD)	(149.847.906)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	1	80.000.000	Larantuka (OPD)	1	84.934.148	Larantuka (OPD)	4.934.148	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	2	88.000.000	Larantuka (OPD)	2	60.003.000	Larantuka (OPD)	(27.997.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan (paket)	2	45.000.000	Larantuka (OPD)	2	37.000.050	Larantuka (OPD)	(7.999.950)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dok)	3	25.000.000	Larantuka (OPD)	3	2.250.000	Larantuka (OPD)	(22.750.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	60.100.000	Larantuka (OPD)	1	35.000.000	Larantuka (OPD)	(25.100.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20	90.000.000	Larantuka (OPD)	20	74.650.000	Larantuka (OPD)	(15.350.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1	2.500.000	Larantuka (OPD)		-		(2.500.000)				
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.300.000.000			-		(2.300.000.000)				
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	2.000.000.000	Larantuka (OPD)		-		(2.000.000.000)				
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	300.000.000	Larantuka (OPD)		-		(300.000.000)				
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	46	464.000.000		46	220.100.000		(243.900.000)			KP	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)	4	3.000.000	Larantuka (OPD)	4	1.500.000	Larantuka (OPD)	(1.500.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	65.000.000	Larantuka (OPD)	12	65.000.000	Larantuka (OPD)	-	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)	30	396.000.000	Larantuka (OPD)	30	153.600.000	Larantuka (OPD)	(242.400.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)	45	289.982.024		35	158.335.000		(131.647.024)			KP	
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	3	78.482.024	Larantuka (OPD)	3	78.469.937	Larantuka (OPD)	(12.087)	APBD II (DAU)			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					P	N	D
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	(13)					
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	17	95.000.000	Larantuka (OPD)	17	49.946.123	Larantuka (OPD)	(45.053.877)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara(unit)	30	7.500.000	Larantuka (OPD)		-		(7.500.000)				
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	2.500.000	Larantuka (OPD)	1	4.995.000	Larantuka (OPD)	2.495.000	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	65.000.000	Larantuka (OPD)	2	19.984.440	Larantuka (OPD)	(45.015.560)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	12	15.000.000	Larantuka (OPD)	12	4.939.500	Larantuka (OPD)	(10.060.500)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	10	26.500.000	Larantuka (OPD)		-		(26.500.000)				
x	xx	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		393	11.710.000.000		390	12.297.273.780		587.273.780			KP	
x	xx	01	2.15	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)	360	11.500.000.000	Larantuka (OPD)	360	12.252.273.780	Larantuka (OPD)	752.273.780	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.15	02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)	3	165.000.000	Larantuka (OPD)		-		(165.000.000)				
x	xx	01	2.15	03	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (orang)	30	45.000.000	Larantuka, luar daerah	30	45.000.000	Larantuka (OPD)	-	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD		36	921.531.301		30	1.142.642.125		221.110.824			KP	
x	xx	01	2.16	02	Fasilitasi fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (laporan)	6	54.000.000	Larantuka (OPD)	6	25.000.000	Larantuka (OPD)	(29.000.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.16	03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (laporan)	30	867.531.301	Larantuka (OPD)	30	1.117.642.125	Larantuka (OPD)	250.110.824	APBD II (DAU)			
4	02				Sekretariat DPRD			5.715.269.150			3.934.201.238		(1.781.067.912)				
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		114	5.715.269.150		94	3.934.201.238		(1.781.067.912)			PP	
4	02	02	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748.019.150		10	626.174.950		(121.844.200)			KP	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)	5	79.019.150	Larantuka (OPD)	5	45.995.440	Larantuka (OPD)	(33.023.710)	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.01	02	Pembahasan rancangan perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)	5	560.000.000	Larantuka (OPD)	5	580.179.510	Larantuka (OPD)	20.179.510	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)	3	59.000.000	Larantuka (OPD)		-		(59.000.000)				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					P	N	D
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	(13)					
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)	2	50.000.000	Larantuka (OPD)		-		(50.000.000)				
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265.000.000		8	129.814.268		(135.185.732)			KP	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)	1	35.000.000	Larantuka (OPD)	1	20.000.660	Larantuka (OPD)	(14.999.340)	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)	2	75.000.000	Larantuka (OPD)	2	30.017.500	Larantuka (OPD)	(44.982.500)	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)	2	75.000.000	Larantuka (OPD)	2	30.000.140	Larantuka (OPD)	(44.999.860)	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.02	05	Pembahasan laporan semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)	2	30.000.000	Larantuka (OPD)	2	20.001.128	Larantuka (OPD)	(9.998.872)	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.02	06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)	1	50.000.000	Larantuka (OPD)	1	29.794.840	Larantuka (OPD)	(20.205.160)	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	75.000.000			-		(75.000.000)				
4	02	02	2.03	06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)	2	25.000.000	Larantuka (OPD)		-		(25.000.000)				
4	02	02	2.03	07	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)	1	50.000.000	Larantuka		-		(50.000.000)				
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607.250.000		6	584.499.644		(22.750.356)			KP	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)	5	600.000.000	Luar daerah	5	577.250.000	Luar daerah	(22.750.000)	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)	1	3.750.000	dalam daerah	1	7.249.644	dalam daerah	3.499.644	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.04	07	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)	1	3.500.000	dalam daerah		-		(3.500.000)				
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3.930.000.000		65	2.583.361.445		(1.346.638.555)			KP	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)	30	280.000.000	dalam daerah	30	400.000.020	dalam daerah	120.000.020	APBD II (DAU)			
4	02	02	2.05	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)	5	50.000.000	Larantuka	5	25.635.433	Larantuka	(24.364.567)	APBD II (DAU)			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	PRIORITAS	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					P	D
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	(13)
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)	30	3.600.000.000	dalam daerah	30	2.157.725.992	dalam daerah	(1.442.274.008)	APBD II (DAU)		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		16	90.000.000		5	10.350.931		(79.649.069)			KP
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)	10	50.000.000	dalam daerah		-		(50.000.000)			
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)	5	15.000.000	dalam daerah	5	10.350.931	dalam daerah	(4.649.069)	APBD II (DAU)		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)	1	25.000.000	dalam daerah		-		(25.000.000)			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 memperhatikan Kaidah – Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 memuat arah kebijakan Pembangunan dan berisikan Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Dokumen RKPD yang disusun memperhatikan kaidah kaidah perencanaan, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah , masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan Kesehatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2023 untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas.

Rencana kerja tahun 2023 ini dijadikan sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam

penyusunan RKA Tahun 2023 menuju ke APBD untuk pelaksanaan Renja. Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur ini disusun sesuai ketentuan berdasarkan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Larantuka, Agustus 2023

Sekretaris DPRD,



Ir. YOHANISKOPONG

PEMBAKUA UTAMA MUDA IV/C

NIP. 19660226 199403 1 003